Mencari Etos Ilmiah Baru dalam Humaniora

PADA th 1961, seorang cendekiawan muda dengan gaya bahasa menggelora *a la* Soerkarno berbicara tentang peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat Indonesia yang masih dilanda kemiskinan dan keterbelakangan. Indonesia, katanya, membutuhkan "barisan pelopor ilmiah" yang mampu melakukan riset ilmiah terapan yang dapat "membantu perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, untuk dipertimbangkan pemerintah, dan juga untuk senantiasa menilai pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum itu". Akan tetapi dia mengingatkan bahwa tugas ilmuwan tidaklah semata-mata menyediakan riset ilmiah terapan melainkan juga riset dasar (*basic*). Kalau tidak, katanya, metode akan berubah menjadi doktrin. Tanggung jawab ilmuwan tidak dapat direduksi kedalam nilai guna suatu kajian bagi pemerintah. Tanggung jawab ilmuwan pertama-tama adalah mengembangkan ilmu itu sendiri. Kerjasama dengan pemerintah pun harus ditempatkan dalam semangat pengembangan ilmu. Oleh karena itu orang muda ini dengan jernih juga berbicara tentang hubungan antara "ilmu dan penguasa". Singkatnya, di satu sisi dia menegaskan tanggung jawab ilmuwan dalam menyediakan konsep teoritis dan riset terapan bagi pemerintah, di sisi lain dia memperingatkan untuk memelihara "sifat otonom" ilmu pengetahuan yang menjadi prasyarat bagi "seni penemuan" (*the art of discovery*).

Orang muda yang dimaksud di atas tidak lain adalah almarhum Soedjatmoko yang menuangkan ide-ide tersebut dalam sebuah artikel berjudul "Dayacipta sebagai Unsur Mutlak dalam Pembangunan".[1] Kalau kita tilik ke belakang, impian Soedjatmoko akan ilmu terapan di Indonesia kiranya tidak

dikecewakan. Pemerintah Orde Baru berhasil memobilisasi tenaga intelektual yang ada untuk menerapkan segala kemampuan mereka dalam menyusun berbagai kebijakan pemerintah yang —secara resmi— "digodok" (istilah yang amat digemari waktu itu) di Jalan Diponegoro (BAPENAS) dan diputuskan di Wisma Negara dan Jalan Cendana.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan (kemanusiaan) terapan kita mengenal tokoh besar Prof. Koentjaraningrat yang sejak awal karier ilmiahnya memilih antropologi terapan yang bertujuan —seperti dia katakan— untuk "meneliti masalah-masalah perubahan serta pergeseran kebudayaan dan masyarakat dalam masa transisi sosial-budaya". Dengan tegas dia mengesampingkan ilmu antropologi "murni" sebagai "ilmu dasar yang meneliti masalah-masalah mengenai asas-asas kebudayaan dan masyarakat guna mengembangkan konsep-konsep, metodologi serta teori-teori baru yang lebih seksama dan tajam".[2]

Pilihan ini —yang kemudian menjadi *policy* pendidikan nasional di bidang ilmu kemanusiaan— ternyata bukannya tanpa menimbulkan persoalan. Peringatan Soedjatmoko akan bahaya teori menjadi doktrin ternyata menjadi kenyataan. Dalam kondisi sosial politik yang kurang demokratis, obsesi akan ilmu terapan ternyata mengebiri status ilmu sebagai ilmu. Pengembangan ilmu kemanusiaan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan kecuali sebuah — meminjam istilah sosiolog Nasikun— "monisme epistemologis". Dengan kata lain, mengikuti logika Soedjatmoko, praktek ilmu kemanusiaan tenggelam dalam *research policy* dan terlempar dari *the art of discovery*. Monisme epistemologis ini berlangsung cukup lama dan baru mulai goyah pada akhir tahun tujuh puluhan ketika sejumlah ilmuwan (seperti Taufik Abdullah) jenuh dengan rutinitas penelitian dan bermimpi untuk duduk di "menara gading".

Baru pada awal tahun 1980-an suara nyaring datang dari mereka yang ingin membebaskan diri dari hegemoni teoris ilmu kemanusiaan. Prof. Sartono berbicara tentang sejarah interdisipliner atau studi umum dalam *humanities*, Kuntowidjojo berbicara tentang ilmu sosial transformatif, dan Arief Budiman berbicara tentang ilmu sosial struktural. Kebangkitan ilmu kemanusiaan yang emansipatif ini juga mengilhami para teolog seperti Banawiratma yang mengedepankan teologi sosial lintas ilmu. Di luar pagar universitas, kita mengenal tokoh seperti Ignas Kleden yang —melalui inspirasi Popper dan Habermas— membuat para ilmuwan kemanusiaan menjadi "gelisah". Ditilik dari perkembangan ilmu kemanusiaan di Indonesia, dua dekade terakhir ini memang ditandai dengan kehausan orang akan praktek ilmu pengetahuan yang tidak semata-mata diabdikan pada *policy* penguasa namun praktek ilmu pengetahuan yang dapat mendampingi perkembangan budaya yang dinamis.

Kalau akhir-akhir ini orang berbicara tentang humaniora baru, hal itu dapat ditempatkan dalam proses pencarian

kembali kedudukan humaniora di tengah-tengah masyarakat jaman sekarang. *Studia humaniora* atau *studia humanitatis* (kajian tentang kemanusiaan) secara tradisional dikaitkan dengan studi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Para humanis dari jaman Renaisans, yang menjadi peletak dasar humanisme modern, membedakan *studia humaniora* dari *studia divinitatis* (*kajian ketuhanan*) dan *barbaritas*. Sebagai ilmu tentang kemanusiaan, humaniora tidak lagi memfokuskan pada teks-teks suci sebagaimana dilakukan para skolastici dari Abad Pertengahan melainkan dari *litterae humaniores* yang diambil dari para pengarang klasik Latin dan Yunani. *Studia humaniora* juga dibedakan dari *studia barbaritas*, yaitu studi tentang "kebudayaan" orang-orang "yang tidak berbudaya". Dalam perkembangan selanjutnya —sejak terjadi revolusi ilmu pengetahuan— humaniora dibedakan dari ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*). Tradisi humaniora inilah yang kini disebut *humanities*. Sejalan dengan awal perkembangannya, *humanities* merupakan isi atau kurikulum pendidikan yang diberikan agar mereka yang dididik mempunyai kesempatkan untuk mengolah dan menyempurnakan kemanusiaannya semaksimal mungkin. *Humanities* mempunyai latar belakang dengan *artes liberales*, *studia humaniora*, dan *studia humanitatis*. Tradisi humaniora memberikan tempat khusus pada sastra. Kalau humaniora bertujuan untuk mendidik agar orang-orang berbudaya dan berbudi luhur, sastra merupakan cara untuk mencapai kebudayaan.

Dengan latar belakang historis inilah pencarian humaniora baru harus kita pahami.

Sejauh ini *new humanities* dikaitkan dengan berbagai "studies" yang akhir-akhir ini marak di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia seperti *postcolonial studies*, *woman studies*, dan *cultural studies*. Apa yang "baru" dari ketiga *studies* ini? Masing-masing merupakan bentuk resistensi terhadap humaniora ortodoks yang memandang "budaya" daerah-daerah koloni (baca: di luar Eropa) sebagai *barbaritas*, memandang manusia yang mempunyai kemanusiaan penuh adalah laki-laki, dan memandang budaya yang pantas dijadikan sebagai bahan kajian hanya budaya yang sudah mapan atau masuk dalam "kanon". Dulu humaniora lahir untuk mengembangkan kemanusiaan manusia. Akan tetapi, dalam perjalannya, humaniora memperlihatkan "*fundamental contradiction at the heart of its project*"[3].

Semangat humaniora baru ini ternyata tidak hanya melahirkan "studies" baru melainkan juga mengusik ilmu-ilmu yang sudah mapan untuk meninjau kembali kedudukannya. Sejarah seni, misalnya, kini mulai ditulis ulang. Sejarah seni bukan lagi berupa daftar kronologis para seniman mapan, karya-karya mereka yang dianggap sublim, dan perkembangan aliran; melainkan dipraktekkan sebagai sejarah kemanusiaan sebagaimana dapat dilihat lewat seni. Sebagai sejarah kemanusiaan, sejarah seni mau tidak mau harus memperhitungkan hal-hal yang baik langsung

atau tidak langsung memungkinkan munculnya seni.

Baik secara terang-terangan atau implisit, entah sadar atau tidak, gejala munculnya humaniora baru ini sudah terlihat di masyarakat kita. Kerinduan orang untuk mempertahankan nilai kemanusiaan (*humanitas*) telah mengilhami sejumlah "pusat" studi yang bermunculan di tanah air, memberikan nuansa baru bagi jurnal-jurnal budaya, mengilhami berbagai gerakan sosial untuk melakukan reorientasi gerakannya, dan mengilhami munculnya berbagai iklan layanan masyarat baik dalam media cetak maupun elektronik.

Ditinjau dari perkembangan ilmu kemanusiaan itu sendiri, humaniora baru merupakan hasil dari refleksi kritis atas maupun dalam lingkungan disiplin-disiplin ilmu sosial-kemanusiaan di tengah-tengah lingkungan kemanusiaan yang berubah secara dramatis. Dalam masa formatifnya —kalau kita lihat secara retrospektif— kesadaran kritis ini mendapatkan bentuk dan status "keilmuannya" ketika humaniora bersinggungan dengan arus pemikiran para postrukturalis Perancis (juga teori sosial kritis) yang secara programatis berupaya mengatasi krisis disipliner yang bibitnya sudah kelihatan sejak awal abad ke-20. Humaniora baru, dengan demikian, menempatkan dirinya pada garis-batas antara disiplin-disiplin ilmu (*disciplinary boundaries*) maupun di garis-batas antara dunia akademis dan dunia praksis.

Mengapa para postrukturalis Perancis memberikan sumbangan desisif bagi munculnya humaniora baru? Ini pertanyaan menarik karena sejauh ini sebutan "anti-humanis" selalu melekat pada mereka. Mereka anti-humanis dalam arti mereka tidak lagi mengambil model *humanitas* dari Jaman Renaisans maupun dari Jaman Pencerahan. Mereka menjadi penyumbang penting bagi humaniora baru karena mereka membuka jalan —dengan filsafat mereka masing-masing— untuk mencari model *humanitas* yang berbeda dengan humanitas yang selama ini menjadi landasan humaniora atau *humanities*. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan mempersoalkan masalah subyektivitas (dan pengetahuan). Untuk itu mereka memeriksa kembali lahirnya subyektivitas Cartesian, perkembangannya pada Jaman Pencerahan, dan kaitannya dengan pembentukan budaya modern pada umumnya. Mereka anti-humanis dalam arti mereka menentang humanisme Jaman Renaisans, dan mereka adalah para humanis dalam arti bahwa mereka tetap menjadikan manusia sebagai pusat perhatian. Kalau, seperti disebut di muka, *postcolonial studies*, *woman studies*, dan *cultural studies* dipandang sebagai bentuk-bentuk manifestasi humaniora baru, hal itu karena ketiganya memanfaatkan perspektif humanis para postrukturalis untuk menulis kembali kesejarahan berbagai kelompok sosial dan budaya yang selama ini dimarginalkan oleh humaniora ortodoks.

Sebagai awal penjajakan teoritis atas humaniora baru, berikut ini akan diuraikan secara singkat tiga kecenderungan humaniora baru, yaitu meta-disipliner, politis, dan tekstual. Uraian ini secara khusus

mengambil kajian budaya sebagai rujukan utama.

Meta-disipliner

Kecenderungan ini muncul sebagai respon terhadap lingkungan kemanusiaan yang berubah secara dahsyat – lingkungan yang terlalu kaya dan kompleks untuk didekati secara ekslusif dari perspektif disiplin-disiplin ilmu sosial-kemanusiaan yang ada. Lingkungan ini ditandai dengan hal-hal seperti teknologi sibernetik (yang terus berkembang dengan pesat seperti mimpi), raja segala raja Kapitalisme (yang mengendalikan reproduksi basis material budaya kita), krisis pratik demokrasi yang dicabut dari konteks politik subyektivitas (demokrasi berubah menjadi partai-krasi atau kapital-krasi). Dengan perspektif meta-disipliner, kajian budaya tidak dimaksudkan untuk menjadi satu ilmu baru di antara disiplin-disiplin ilmu yang sudah ada. Demikian juga, pendekatan kajian budaya tidak dimaksudkan untuk menggantikan ilmu-ilmu kemanusiaan.

Sebaliknya, kecenderungan meta-disipliner menunjuk pada bentuk pendekatan terhadap realitas sosial dan kultural kontemporer yang menghendaki multi-perspektif. Perspektivisme (relativisme) Nietzschean, dekonstruksi Derridean, dan kecendekiawanan spesifik Foucauldian — semuanya ini memberikan sumbangan besar untuk merancang sebuah pendekatan ilmu humaniora yang tidak jatuh pada humanisme universal warisan Renaisans. Dalam kajian budaya, semangat meta-disipliner ini memberikan perspektif baru bagi kerjasama antardisiplin ilmu. Yaitu, bukan bentuk kerjasama antar-ilmu dimana masing-masing ilmu secara tidak sadar masih dikuasai oleh rigiditas disipliner melainkan bentuk kerjasama yang membiarkan suatu disiplin ilmu melihat keterbatasannya (untuk tidak mengatakan kebutaannya).

Untuk menamai koalisi antar ilmu orang memberikan istilah bermacam-macam seperti *cross-disciplinary*, *supra-disciplinary*, dan *post-disciplinary*. Ilmu-ilmu yang terkait dengan pendekatan budaya meliputi teori sastra, antropologi (budaya), komunikasi, ilmu politik, ekonomi, dan filsafat (epistemologi dan estetika). Harus dikatakan di sini bahwa berbagai praktek kajian budaya selama ini tidak selamanya berhasil memasuki wilayah meta-disipliner. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap kajian budaya adalah bahwa kajian budaya masih membiarkan dirinya "di-akomodasikan" dalam praktek-praktek disipliner yang sudah mapan! Hal ini terutama terjadi ketika kajian budaya di-lembagakan kedalam universitas yang sudah ada.

Politis

Kajian budaya cenderung bersifat *politis*. Artinya, orientasi kajian budaya pertama-tama bukan untuk memenuhi naluri kita akan pengetahuan (*the will to knowledge*) *tentang* budaya melainkan keinginan untuk menata berbagai hubungan kekuasaan dalam

masyarakat (*the will to power*) yang menjadi konteks produksi budaya. Apa yang dilakukan dalam kajian budaya bukanlah semacam kajian *tentang* model-model, hukum, dan hakekat kebudayaan yang berlaku universal dan abadi atau, singkatnya, *unconditioned*. Sebaliknya, melakukan kajian budaya berarti terlibat secara politis dalam proses produksi, reproduksi, dan transformasi lembaga, struktur kekuasaan, sistem sosial dan ekonomis agar hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat tidak menjurus pada hubungan yang tiranis dan destruktif.

Aspek politis ini perlu ditonjolkan karena pengetahuan atau wacana ilmiah tidak diproduksi dalam ruang hampa melainkan dalam suatu masyarakat dengan berbagai hubungan kekuasaan. Dua buku Edaward Said *Orientalism* dan *Culture and Imperialism* —yang dapat dipandang sebagai *the founding texts* poskolonialisme— merupakan contoh ilmu kemanusiaan dipraktekkan secara politis. Edward Said berhasil menunjukkan lingkungan hubungan kekuasaan (antara Timur dan Barat) di mana wacana tentang Timur dan tentang Barat diproduksi.

Aspek politis juga tampak dalam kajian perempuan. Kajian perempuan tidak lagi dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan tentang kodrat (*natura*) dan hakekat (*essentia*) perempuan melainkan untuk melihat konfigurasi hubungan kekuasaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi cara perempuan dihadirkan (baik secara ilmiah, moral, dan legal) dalam masyarakat tertentu.

Dengan kata lain, aspek politis humaniora baru meliputi intervensi untuk membuka wilayah publik seluas-luasnya agar semakin banyak kelompok sosial dan budaya dapat mengartikulasikan identitas dan aspirasinya. Hanya dengan cara inilah masyarakat melahirkan dirinya terus-menerus. Oleh karena itu kecendekiawanan (*scholarship*) dalam kegiatan humaniora baru pertama-tama tidak diukur dari kemampuan untuk menyusun sebuah teori besar yang dapat menjelaskan berbagai persolan kemanusiaan jaman sekarang melainkan dari inspirasinya untuk melakukan imaginasi sosial dengan segala pertanyaan yang mungkin belum diketahui jawabannya, bukan dari banyaknya informasi yang dikumpulkan melainkan dari tanggung jawab untuk memilih informasi yang relevan untuk melihat hubungan-hubungan kekuasaan yang masih samar namun dirasakan, dan bukan dari keberhasilan dalam menyusun ideologi untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada melainkan ketajamannya dalam memberikan visi untuk melakukan transformasi dan resistensi sosial dengan segala ketidakpastiannya.

Tekstual

Humaniora baru bersifat tekstual. Kajian budaya bahkan sering disebut *humanities-based textual commentary*. Dalam kajian budaya, yang banyak diilhami oleh teori-teori teks seperti semiotika dan teori

wacana, "teks" merupakan kategori penting untuk mendekati apa yang kita sebut "budaya". Budaya adalah kegiatan kelompok sosial untuk menghasilkan dan memahami teks tentang dirinya dan kelompok lain. Kajian budaya sebagai analisis tekstual meliputi tiga bidang, yaitu produksi teks *(writing)*, distribusi teks *(communication)*, dan resepsi teks (*reading*).

Bidang pertama ditujukan untuk memeriksa kondisi sosial, ekonomis dan politis tempat teks (terutama teks dominan) diproduksi dan direproduksi. Bidang kedua diarahkan untuk memeriksa "lalu lintas" dan cara berada teks dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang ditandai dengan teknologi informasi baru dan kapital sebagai faktor penting, kebudayaan sebagai komunikasi perlu diperiksa ulang sesuai dengan pengalaman orang jaman sekarang. Masih relevankah kita berbicara tentang kelompok-kelompok budaya atau sub-kultur dalam masyarakat yang basis material kebudayaannya di-mono-poli oleh kekuatan kapital secara halus? Masih adakah "masyarakat" *(society)* dimana hubungan antar manusianya sudah selalu lewat media? Apakah virtual society sebagaimana dibentuk lewat media, misalnya internet, dapat menggantikan real atau *face-to-face society?*

Ditinjau dari resepsi teks, apakah kita masih bisa berbicara tentang identitas, subjektivitas, dan intersubjektivitas? Bukankah dalam lalu lintas tekstual ini kita – mau atau tidak, sadar atau tidak, suka atau tidak – sudah menjadi semacam "terminal-kedatangan" komoditas kultural/tekstual yang berasal dari markas raja segala raja Kapital yang menjadikan *pleasure* dan *sign-value* (semacam prestise) sebagai nilai tukarnya? Masihkah kita merasa diri sebagai makhluk sosial atau *homo politicus* (i.e. orang yang hidup dalam *polis)* ataukah kita sudah menjadi makhluk artifisial (i.e. makhluk yang hidup dalam masyarakat maya)? Adakah perubahan fundamental dalam diri manusia jaman sekarang dalam mengalami sosialitas atau kebersamaannya? Apakah kategori "massa" merupakan entitas homogen atau masih menyisakan kemungkinan-kemungkinan untuk keanekaan? Kalau kita memilih jawaban yang kedua, apakah basis keanekaan tersebut yang menjadi landasan bagi munculnya keanekaan resistensi *(mutliplicity of points of resistence)* terhadap budaya dominan?

Nyatalah kita perlu memeriksa kembali kategori-kategori seperti "masyarakat", "kelompok budaya", "identitas", "subjektivitas", "otentisitas"; watak teknologi komunikasi dalam melayani manusia; perkembangan ideologi kapitalisme untuk mempertahankan eksistensinya; dan pengalaman orang jaman melihat perubahan lingkungan kemanusiaannya yang baru dan upaya mereka untuk melakukan resistensi baik secara sosial, ideologis, maupun kultural. Tidak kurang penting, kita pun akan terusik untuk melihat dinamika wacana moral —wacana yang dipakai untuk memasuki wilayah pengalaman manusia ketika seseorang merasa diri baik atau buruk dan berharga atau tidak dalam arti sedalam-dalamnya.

Dengan memahami pendekatan kajian budaya dengan ketiga kecenderungannya di atas, sudah saatnya kita berusaha untuk melakukan ekperimen akademis di lingkungan pendidikan tinggi untuk ikut mempengaruhi secara aktif (paling tidak secara kelembagaan!) dalam produksi budaya di Indonesia dan juga sebuah eksperimen sebuah lembaga akademis untuk membiarkan dirinya dipengaruhi oleh dinamika masyarakat di sekitarnya.

Di manakah tempat kajian budaya dalam dunia akademik kita? Dapatkah kajian budaya memberikan inspirasi bagi dunia perguruan tinggi yang akhir-akhir ini terus didesak (oleh zaman dan situasi) agar memperbaharui diri supaya tidak mengasingkan dan terasing dari masyarakatnya? Dapatkah orang berbicara tentang reformasi tanpa menyentuh lembaga yang mempersiapkan elit masyarakat? Dapatkah orang berbicara tentang masyarakat sipil atau emansipasi kultural tanpa memeriksa kembali kehidupan perguruan tinggi dari kacamata kemerdekaan berpikir dan kreativitas budi?

Dengan memperhatikan kondisi kehidupan sekarang, saat ini merupakan saat terpenting untuk berbicara tentang masa depan. Oleh karena itu setiap pembicaraan tentang perguruan tinggi juga harus ditempatkan dalam konteks masa depan. Dalam sejarah universitas modern, tidaklah mengherankan bahwa pada tahun 1928 di tengah-tengah bangsa Mesir yang sedang prihatin akan masa depan kebudayaan dan melihat islah sebagai jalan yang tak dapat ditawar, sejumlah tokoh (termasuk Taha Husain) menganggap bahwa persoalan semangat akademik (*rûh al-jâmi'î*) adalah persoalan luar biasa penting dan krusial (*maudu' khatîr*), karena roh akademik menyentuh hubungan antara kehidupan intelektual dan masa depan budaya (*al-silla bi-hayâti-na al-fikrîya wa-mustaqbali-ha al-thaqâfî*)[4]. Singkatnya, berbicara tentang roh akademik berarti berbicara tentang masa depan. Demikian juga, mengintegrasikan kajian budaya kedalam lingkungan akademik juga berarti menyentuh strategi mempersiapkan budaya masa depan.

Ini semua memang baru sebuah idealisme. Agar idealisme ini tidak terbelenggu dalam abstraksi logis belaka dan terdampar dalam lembaga formal semata, maka dibutuhkan koalisi antar ilmu dan koalisi dunia akademis dan dunia "luar". *

Redaksi Retorika

Catatan

[1] Soedjatmoko (1984), *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

[2] Koentjaraningrat (1982), *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 6.

[3] Leela Gandhi (1998), *Poscolonial Theory. A Critical Introduction*. Allen & Unwin, 48.

[4] Taha Husain (1928) "al-Rûh al-Jâma`î" dlm. *al-Hilâl*, No. 75, 209.